

Summary
Diskusi Presentasi Plenary Session GCOS 26 Oktober 2009
Hotel Shangrilla, Jakarta

Pada sesi plenary yang diikuti oleh seluruh peserta Global Conference on Open Source ini, ditampilkan empat pembicara dari wakil pihak pemerintah (Duta Besar Brazilia, Yang Mulia Manuel Innocencio De Lacerda Santor Jr, yang gencar menggalakkan migrasi ke Open Source), wakil komunitas (Sunil Abraham, dari Center for Internet Studies, India), wakil Perusahaan (Koh Hong Eng, dari Sun Microsystem Asia), dan wakil pembuat standar (Marino Marcich dari Open Data Format Alliances).

Mr. Santos Junior memulai presentasi singkat dengan mengungkapkan tentang migrasi ke perangkat lunak open source yang sudah dilakukan di instansi-instansi pemerintah di Brazilia sejak tahun 2003. Open source dianggap sebagai instrumen yang efektif dalam penggunaan teknologi. Open Source memperluas akses dan partisipasi dalam fase-fase yang dialami negara berkembang, sehingga dapat melibatkan lebih banyak orang dalam menggunakan teknologi. Migrasi ke open source telah menjadi kebijakan penting di departemen luar negeri Brazilia.

Mr. Sunil Abraham, dari Mahiti.org mengemukakan tentang pentingnya kebebasan untuk memodifikasi dan memperbaiki program yang diberikan oleh open source. Menurut Sunil pengalaman di India memperlihatkan pengalaman berbagai perusahaan multinasional yang ada di India. Dengan proprietary software yang digunakan, sulit ditemukan produk software India. Keterbatasan yang dibuat oleh *trade agreement*, *copy right*, dan perusahaan yang dimiliki oleh USA dan Amerika Serikat, maka sulit menyebut bahwa produk tersebut adalah produk India. Sunil menyebut India sebagai “Kuli Cyber” yang pengalamannya sebaiknya jangan diikuti negara lain. Hal ini berbeda dengan fakta bahwa negara kecil seperti Estonia yang bisa menghasilkan produk perangkat lunak seperti Skype. Walaupun agak merendah, hal ini perlu diperhatikan di Indonesia dalam mengelolal E-Bisnis dibidang perangkat lunak ke depan. Dalam presentasi yang berjudul “*Mainstreaming FOSS: legal policy and work ahead*” ini, dicontohkan tentang dasi yang dipakai Bapak duta besar. Ketika membeli dasi tersebut Bapak Duta Besar telah memiliki hak untuk memodifikasi dan melakukan berbagai perubahan terhadap dasi yang dibelinya. Hal ini berbeda dengan proprietary software yang dibeli yang memberikan restriksi yang beragam yang harus diterima persyaratannya oleh pembeli, yang membatasi modifikasi dan penambahan fungsi, bahkan tidak memberikan akses ke sumber kode.

Mr. Marino Marcich dari Open Data Format Alliance memberikan presentasi tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai kemajuan dibidang perangkat lunak. Informasi yang terkunci dalam format tertentu seperti

Microsoft Office sudah tidak dapat diterima lagi diberbagai instansi pemerintah, dengan munculnya gerakan ke free open source software. Oleh karena itu diperlukan standar Open Document Format yang merupakan format file document berbasis open XML untuk aplikasi office yang dipakai untuk dokumen yang berbentuk teks, spreadsheets, charts, dan elemen grafis. Kebutuhan untuk akses jangka panjang ke informasi yang kita buat sendiri juga memberikan kemungkinan kedepan untuk berbagai perangkat lunak yang didukung oleh ODF, dan menciptakan kemungkinan bagi pengembang lokal untuk berinovasi. Hal ini akan menguntungkan organisasi pemerintah dan masyarakat yang dapat mengadopsi Open Document Format. Pada perang format ini, banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan produktifitas kantor. Hingga saat ini Microsoft sudah berusaha untuk sesuai dengan ODF.

Pada presentasinya tentang “Open source and open standards: choice, value and innovation”, Hong-Eng Koh yang merupakan Direktur Regional Sun Microsystems Inc Asia, dibidang Pendidikan dan Layanan Kesehatan, mengemukakan bahwa pemerintah di beberapa negara telah berusaha memanfaatkan perangkat lunak Open Source bukan karena ingin memodifikasi source code, tapi secara sederhana ingin mendapatkan perangkat lunak secara gratis. Semuanya ingin terbebas dari satu vendor teknologi mulai dari desktop ke mainframe yang ada. Disamping itu juga diharapkan terjadi peningkatan kompetisi untuk inovasi dan efisiensi biaya. Interoperabilitas dan data sharing pada sistem heterogen juga merupakan hal yang diharapkan. Dalam hal ini perangkat lunak open source dan open standard bisa bersama-sama dimanfaatkan dalam pilihan, nilai dan inovasi yang dibuat. Sun Microsystem misalnya merupakan perusahaan yang telah berusaha menyediakan perangkat lunak open source sejak lama dan banyak digunakan. Dalam hal ini nilai tambah dapat ditingkatkan. Mr. Hong-Eng Koh mengemukakan bahwa standar terbuka sangat diperlukan, misalnya dalam menentukan warna yang bervariasi hingga 20-30 pilihan. Open content juga merupakan hal yang diharapkan dalam penyebaran informasi dan memastikan hak pada informasi public. Dengan adanya berbagai standar terbuka dan open source seperti star office, linux kernel dan lain-lain yang dapat dimodifikasi, kompetisi dapat dimungkinkan.

Dalam pertanyaan mengenai kemungkinan implementasi Cloud Computing, and Software as a Service ke depan, serta kemungkinan kita harus menyerahkan semua data ke Open Cloud seperti Google, maka terdapat beberapa versi jawaban. Sun Microsystem melihatnya seperti kembali ke jaman Mainframe dulu. Pembicara lainnya mengetengahkan tentang gerakan global untuk menuju kebebasan dari vendor dan proprietary software, sedangkan Cloud Computing kemungkinan adalah bentuk outsourcing dan pembatasan kedepan. Pembicara lainnya menekankan tentang perlunya standar terbuka yang memberikan kesempatan semua pihak untuk terus berinovasi di tingkat aplikasi. Disamping itu juga perlu diperhatikan tentang masalah hukum dan etika agar produktifitas tetap terjaga walaupun bentuk Social Networking yang saat ini ada memberikan berbagai kemungkinan pengembangan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

Dalam sesi tanya jawab yang memperlihatkan antusiasme peserta, antara lain ditanyakan tentang adaptasi yang lambat dari *open source software* mengingat di Indonesia Legal Software juga sudah menjadi program pemerintah (Bp. Sumitro - AOSI). Untuk mempercepat hal ini perlu dilakukan pendidikan dan dukungan yang baik bagi pengguna yang merupakan pemakai biasa. Mr. Sunil Abraham misalnya menjawab bahwa jika menggunakan proprietary software maka seorang pekerja dapat diberikan diinsentif dengan pemotongan gaji. Selain itu pembicara lain juga memberikan solusi pendekatan top down, misalnya jika memilih perangkat lunak open source maka seorang pegawai bisa memanfaatkan monitor berlayar datar.

Penanya kedua (Anwar – Java Complete) menanyakan tentang dukungan terhadap berbagai distribusi perangkat lunak open source yang beragam. Untuk pengembang misalnya peningkatan produktifitas perangkat lunak pada Sun misalnya dilakukan dengan Open Solaris yang memiliki binary compatibility, yang dapat di recompile kembali. Apache project misalnya tidak terlalu memperhatikan distribusi, namun banyak digunakan developer.

Penanya ketiga (Syarifudin Abdallah-Politeknik Caltex Riau) menanyakan tentang bagaimana mempromosi open source software secara sederhana kepada seorang anak misalnya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana agar kita tidak menjadi cyber Coolies, namun menjadi pemilik dari perangkat lunak dan teknologi. Para pembicara menerangkan bahwa jawaban yang paling mudah adalah dengan menerangkan manfaat dari penggunaan software open source, dan memberi kesempatan untuk memanfaatkannya. Pengalaman bahwa ketika proprietary software bermasalah dan pengguna terpaksa menggunakan sistem pengganti, maka mereka akan terbiasa menggunakan sistem. Pembicara lain menawarkan cara dengan memberikan alternatif kepada pengguna, dengan menjelaskan bahwa jika mereka menggunakan Microsoft Realtime Player untuk menjalankan video maka Microsoft tahu apa yang kita jalankan, sedangkan jika kita menggunakan VLC streaming software maka hanya kita yang mengetahui aksi itu. Selain itu pengetahuan tentang kesepakatan WIPO WTC dan sanksi hukumnya. Disamping itu juga disampaikan pengalaman pada pembuatan aplikasi misalnya fercuilate yang berhubungan dengan itunes, dan scribullous yang dituntut oleh pemilik scribble ke meja hukum.

Penanya selanjutnya (Didin- Linux) tertarik pada istilah *mainstreaming open source* apakah sebaiknya dilakukan dengan cara top-down, central-district, atau dengan cara lain. Para pembicara menjawab bahwa potensi penggunaan open source di pemerintahan saja sudah cukup besar, perlu ada ketentuan pemerintah yang pro pada FOSS dan pemilihan informasi dan open standar (ODF). Penyebarluasan open source akan menjadi satu segmen dipasar teknologi informasi.

Penanya kelima Sita Laksmi dari Jogja, menanyakan tentang bagaimana strategi yang baik untuk mendukung penggunaan open source di daerah. Salah satu pembicara

menjelaskan bahwa layanan dukungan perlu dilakukan oleh tim helpdesk yang bukan tim sementara. Perlu ada bagian non teknis dari MOU yang disesuaikan dengan pegawai pemerintah lokal, tim helpdesk, dan strategi migrasi. Perlu ada tim lokal untuk melakukan dukungan (client support).

Untuk setiap pertanyaan seluruh pembicara bergantian memberikan pendapatnya. Duta besar dari Brazil juga dengan antusias menjawab pertanyaan yang diajukan. Sisi pandang pembicara yang beragam dari pemerintah, komunitas, perusahaan teknologi informasi dan pembuat standar membuat diskusi menjadi menarik. Sesi plenary yang berlangsung dua jam sangat intensif dan menarik minat peserta serta menjadi pengantar bagi diskusi pada sesi-sesi selanjutnya.

*****Riri Fitri Sari (RFS021109)*****